

**KESIAPAN PENGELOLAAN ASET UNY DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
INCOME GENERATING UNTUK Mendukung PTNBH UNY****READINESS OF ASSET MANAGEMENT OF UNY FOR OPTIMIZATION OF INCOME  
GENERATING TO SUPPORT PTNBH UNY****Dhyah Setyorini, Rr. Indah Mustikawati, Indarto Waluyo**

Universitas Negeri Yogyakarta

[dhyah\\_setyorini@uny.ac.id](mailto:dhyah_setyorini@uny.ac.id)**Abstrak**

Riset ini bertujuan untuk melihat kesiapan UNY dalam mengelola aset dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung PTN-BH UNY. Riset ini penting dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap kesiapan UNY dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait pengelolaan asetnya. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan bulan Februari hingga September 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesiapan pengelolaan akun aset pada UNY. Subjek dalam penelitian ini adalah personal yang bekerja mengelola anggaran khususnya aset di bawah koordinasi Badan Pengawas Pengelolaan Usaha (BPPU) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dari tahapan kesiapan pengelolaan aset, hanya tahap pertama (sosialisasi) yang telah terlaksana, tahap kedua terkait tata kelola telah disiapkan semua perangkat yang mengatur (Peraturan Rektor) UNY PTN-BH namun payung hukumnya belum disahkan oleh Presiden, sehingga perubahan tatakelola belum dapat dilaksanakan secara penuh. Tahap terakhir transfer aset belum dapat dilaksanakan. Identifikasi aset baru terlaksana di lingkup internal, identifikasi dengan KPKPN belum dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena selain identifikasi internal belum selesai, payung hukum juga belum disahkan. Kondisi ini membuat UNY belum dapat bergerak melakukan harmonisasi. Perlu identifikasi aset lebih lanjut karena beberapa aset yang di bawah BPPU statusnya masih tahap pengembangan. Selain itu, perlu diagendakan kejelasan peran, fungsi dan tanggungjawab antara Inkubator Bisnis UNY dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset.

**Kata kunci: Kesiapan, Pengelolaan Aset, PTN-BH****Abstract**

*This research aims to see the readiness of UNY to manage assets to maximize income to support PTN-BH UNY. It is essential to conduct this research to gain confidence in the preparedness of UNY in financial management, especially concerning asset management. This research design is qualitative descriptive research with a case study approach. The research time is from February to September 2022 at Yogyakarta State University, by conducting observations and in-depth interviews. The research object used in this study is the readiness of asset account management at UNY. The issues in this study were the person who worked to manage the budget, especially assets, under the coordination of the BPPU and the SPI. The technique for testing the validity of the data uses a credibility test by means of source triangulation. This research data analysis technique uses the Miles and Huberman model. The results showed that only the first stage of asset management readiness (socialization) had done. For the second stage, the governance has prepared all the tools that*



regulate (Rector's Regulation) UNY PTN- BH. Still, the President has not ratified the rules, so governance changes have not yet been fully implemented. The last stage, asset transfer has not yet been carried out. The identification of new assets is carried out internally, but the identification with KPKPN has not yet been implemented. This is because the rule has not yet been ratified apart from the incomplete internal identification. This condition makes UNY unable to move doing harmonization. Further identification of assets is needed because several assets under BPPU are still in the development stage. In addition, it is necessary to schedule clarification of roles, functions and responsibilities between the UNY Business Incubator and BPPU in an effort to optimize assets.

**Keywords: readiness, assets management, PTN-BH**

## PENDAHULUAN

### *Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)*

Tuntutan perubahan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dari status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) tidak dapat dihindari. PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan status PTN tertinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya. PTN yang sudah berbadan hukum harus menjadi perguruan tinggi yang memiliki kemampuan/kapasitas untuk mengelola urusan sumber daya manusia (SDM), aset, dan keuangan secara mandiri.

Terdapat tiga tingkatan status PTN yakni, PTN Badan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN-Satker). Tingkat status tersebut diurutkan berdasarkan tingkat otonomi dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Perbedaan PTN Satker/BLU dengan PTN-BH, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Perbedaan PTN Satker/BLU dengan PTN-BH

Salah satu persyaratan untuk menjadi PTN-BH adalah terpenuhinya standar minimum kelayakan finansial, oleh karena itu UNY harus mempersiapkan diri untuk mandiri secara finansial. Kemandirian finansial ini tidak dapat dicapai secara mudah dan instan. Pengelolaan keuangan menjadi kunci penting kemandirian finansial perguruan tinggi. Kemandirian finansial menjadi tujuan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Artinya sumber dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak hanya bersumber dari pemasukan iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan dana penyertaan dari APBN (Permenristekdikti No. 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti), tetapi dapat berasal dari berbagai layanan dan produk inovatif yang mampu



memberikan nilai tambah dalam penerimaan negara bukan pajak universitas. Kebijakan ini memberikan tantangan dalam peninjauan dan perumusan struktur organisasi, manajemen dan pengembangan lembaga/unit di lingkungan UNY. Adanya penekanan untuk mampu menghasilkan nilai tambah dalam pemasukan dana untuk pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi, menuntut kemandirian finansial perguruan tinggi segera terealisasi. Kemandirian finansial memberikan dampak dalam keleluasaan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021 masuk dalam kategori A dengan nilai 80,92, sama dengan capaian tahun 2020 yaitu kategori A dengan nilai 80,72 (rentang nilai 80-90), dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Hasil ini jika dibandingkan dengan target rata-rata predikat SAKIP nasional juga lebih tinggi dimana target nasional minimal BB.

Penerimaan dari pengelolaan aset yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU) terdiri dari aset-aset yang berada di tingkat universitas, Fakultas, maupun unit-unit lainnya. Meskipun target Renstra telah tercapai tetapi aset-aset di UNY sebagai penghasil *income generating* yang ada selama ini belum pernah diaudit secara khusus. Audit yang dilaksanakan selama ini masih terbatas pada audit pengadaan barang dan jasa (PBJ) di masing-masing fakultas dan sistem remunerasi. Audit terkait aset secara khusus belum pernah dilakukan. Namun demikian dalam setiap penugasan audit, SPI UNY tetap mengaudit aset sebagai bagian dari penugasan, tetapi tidak secara khusus.

### ***Kemandirian Finansial***

Pada bidang ilmu akuntansi sektor publik kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Demikian juga pada institusi perguruan tinggi, kemandirian finansial menunjukkan sumber dana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tidak hanya bersumber dari pemasukan iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan dana penyertaan dari APBN (Permenristekdikti no. 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti), tetapi dapat berasal dari berbagai layanan dan produk inovatif yang mampu memberikan nilai tambah dalam penerimaan negara bukan pajak universitas. Sama halnya dalam konteks pemerintah daerah, yaitu semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya, semakin tinggi rasio kemandirian perguruan tinggi, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan APBN) semakin rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lembaga/institusinya (Roswaty, 2017).

Menimbang pentingnya pengelolaan keuangan dalam mencapai kemandirian finansial menjadi PTN BH, maka penilaian pengelolaan aset-aset UNY dalam rangka optimalisasi *income generating* untuk mendukung UNY sebagai PTN BH sangat penting. Dengan pengelolaan aset yang memadai maka mencerminkan pengelolaan keuangan yang memadai pula. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien akan mengurangi ketergantungan institusi terhadap pendanaan dari luar. Dalam konteks penelitian ini mengurangi ketergantungan UNY dari APBN. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, maka tingkat kemandirian finansial semakin tinggi (Iskak et al., 2020). Dengan kata lain semakin besar pendapatan asli daerah UNY (dari aset yang dimiliki) dibandingkan dengan total pendapatannya maka semakin tinggi kemandirian finansial UNY.



### ***Optimalisasi Pengelolaan Aset***

UNY sebagai institusi dibawah Kemenristekdikti, dalam proses penyelenggaraan kegiatannya harus senantiasa didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:

**a. Azas Fungsional**

Asas fungsional yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah di bidang pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut,

**b. Azas Kepastian Hukum**

Dalam hal ini, asas kepastian hukum yang dimaksudkan adalah suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c. Azas Transparansi**

Asas transparansi yang dimaksudkan disini adalah suatu proses penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

**d. Azas Efisiensi**

Asas efisiensi yang dimaksudkan disini, merupakan suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah tersebut dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.

**e. Azas Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah setiap kegiatan daripengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsip harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada seluruh komponen masyarakat daerah.

**f. Azas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengelolaan Aset/barang milik daerah yang harus di dukung oleh adanya ketepatan daeri jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan



pemindahtanganan barang milik daerah serta dalam proses penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pengelolaan aset merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan layanan publik, yang. Agar pengelolaan aset optimal maka perlu diperhatikan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan secara keseluruhan (Maulidiah, 2017). Perencanaan kebutuhan merupakan suatu kegiatan yang merumuskan adanya rincian tentang kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan akan barang. Perencanaan yang baik akan mendukung kinerja organisasi dan menghemat pengeluaran barang.

Terkait aspek pengadaan barang, prinsip efisiensi, efektif, transparansi, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel harus dipegang teguh. Untuk menjaga komitmen pelaksanaan prinsip tersebut maka semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang harus memenuhi etika pengadaan barang yang berlaku. Adapun sistem pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut: pertama, swakelola yaitu dilaksanakan sendiri oleh intitusi yang bersangkutan; kedua, melalui penyedia barang/jasa (*outsourcing*).

Pengamanan aset atau barang menjadi hal yang penting karena menjadi bagian dari sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan barang (Mardiasmo, 2004). Pengamanan merupakan suatu kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik negaradalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Adapun pemeliharaan aset adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik negara selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan hasil guna. Pada pemeliharaan barang dilaksanakan tanpa mengubah, menambah, ataupun mengurangi, bahkan konstruksi asal.

Aspek terakhir, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan dengan tujuan agar pengelolaan barang/aset negara lancar. Proses pengawasan dilaksanakan sejak dari awal perencanaan asset hingga penghapusannya.

Pengelolaan aset merupakan bagian dari pengelolaan keuangan suatu institusi. Pengelolaan aset institusi yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan institusi yang baik (Setiadi, 2020). Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dalam Rangka Optimalisasi *Income Generating* untuk Mendukung PTNBH UNY. Hasil dari kajian ini diharapkan diperoleh informasi tentang kinerja aset UNY dalam rangka persiapan UNY menuju PTN BH sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan terkait persiapan UNY yang akan beralih status dari BLU ke PTN-BH. Riset ini penting dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap pengelolaan keuangan khususnya terkait aset, baik dari sisi kepemilikan rekening, perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, dan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

### *Desain Penelitian dan Teknik Pengambilan Data*

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Adapun penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2010). Pendekatan studi kasus merupakan strategi dari penelitian kualitatif untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam terhadap suatu permasalahan (Cresswell, 2009). Penelitian studi kasus ini mengenai pengelolaan akun aset UNY dalam rangka optimalisasi *income generating* untuk mendukung PTNBH UNY. Penelitian ini dilaksanakan mulai



bulan Februari hingga September 2022. Tempat penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281.

Variabel pada penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu kajian pengelolaan atas aset UNY dalam rangka optimalisasi *income generating* untuk mendukung PTNBH UNY. Kajian pengelolaan aset UNY merupakan evaluasi dan analisis secara keseluruhan terhadap aset UNY yang berpotensi menghasilkan *income generating* dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan atas masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada dua unit kerja yaitu Badan Pengawasan dan Pengelolaan Usaha (BPPU) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY. Peneliti mengamati bagaimana BPPU mengelola semua unit usaha yang menghasilkan pemasukan bagi UNY. Adapun pada SPI, peneliti mengamati bagaimana unit tersebut melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimiliki UNY.

### 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya yaitu pengelola Unit Barang Milik Negara (UBMN) UNY, pengelola Badan Pengawas dan Pengelolaan Usaha (BPPU) UNY, Bendahara Penerimaan UNY, dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY.

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan, laporan-laporan, serta dokumen-dokumen yang dikelola oleh Pengelola UBMN UNY, pengelola BPPU UNY, Bendahara Penerimaan Bidang Keuangan UNY, dan SPI UNY.

## *Objek dan Subjek Penelitian*

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan akun aset pada UNY. Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah personal yang bekerja mengelola anggaran khususnya aset di bawah koordinasi Bagian Keuangan BUPK UNY serta SPI UNY.

Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji keabsahan data agar data dari penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2010). Adapun teknik pengujian keabsahan data yang akan digunakan adalah Uji Kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji atas kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan berbagai metode kualitatif, antara lain dengan cara triangulasi sumber. Triangulasi sumber meliputi BPPU dan SPI. Data dari kedua pihak dapat menunjukkan kesesuaian pola pengelolaan aset di UNY.



### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup empat aktivitas, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### ***Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dari Sudut Pandang Pengelola***

Perubahan untuk menjadi PTN-BH harus berdasar pada mandat agar jelas kedudukan hukumnya dengan berbagai pengaturan arah jangkauan sebagai sebuah PTN-BH. Pemerintah mendorong agar PTN memiliki potensi menjadi institusi yang mandiri, produktif, dan mampu melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Salah satu mediasi mencapai kemandirian tersebut adalah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan nonkeuangan yang berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat.

Kebijakan Kemenristekdikti tentang PTN-BH Kebijakan Kemenristekdikti tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berfungsi untuk memberikan kewenangan mandiri dalam pengelolaan baik dalam bidang akademik (meliputi pengembangan keilmuan melalui pembukaan prodi-prodi visioner dan penelitian-penelitian ilmiah inovatif) maupun bidang nonakademik (pengelolaan aset/kekayaan dan keuangan melalui berbagai berbagai usaha-usaha mandiri). Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan PP Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.

Penetapan PTN-BH kepada beberapa perguruan tinggi Negeri yang dipandang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan untuk dapat meningkatkan daya saing di tingkat Asia dan Internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmiah. Saat ini terdapat terdapat 11 PTN-BH, yaitu: ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, Unair, Unpad, Undip, Unhas, dan ITS; berbanding dengan 24 PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan sisanya berstatus Satker. Dengan jumlah PTN-BH yang masih terbatas, UNY yang berstatus PTN BLU dan memiliki reputasi akademik dan nonakademik yang terus bersaing memiliki peluang untuk naik kelas menjadi PTN-BH. Dengan menjadi PTN-BH maka UNY memiliki kewenangan mandiri untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui berbagai inovasi dalam pendidikan dan penelitian; dan mampu menghadapi berbagai tantangan operasional yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kemandirian finansial, memenuhi tuntutan akreditasi nasional dan internasional, meningkatkan ranking perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional, dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kemajuan teknologi informasi mutakhir.

Menimbang pentingnya pengelolaan keuangan dalam mencapai kemandirian finansial menjadi PTN BH, maka kajian pengelolaan atas aset UNY dalam rangka optimalisasi *income generating* diperlukan untuk mendukung UNY menjadi PTN BH. Aset-aset di UNY yang ada selama ini belum pernah diidentifikasi dan diaudit secara khusus. Audit yang dilaksanakan selama ini masih terbatas pada audit pengadaan barang dan jasa (PBJ) di masing-masing fakultas dan sistem remunerasi. Dengan melakukan kajian pengelolaan atas aset diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi perolehan *income generating* saat UNY menjadi PTN BH.

Salah satu penilaian kelayakan PTN BLU berubah menjadi PTN-BH adalah memenuhi standar kelayakan finansial. Standar kelayakan finansial ini dinilai berdasarkan beberapa kriteria, yaitu.



Pengelolaan keuangan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua laporan keuangan memperoleh opini wajar selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Terakhir, PTN mampu menggali dana selain dari biaya pendidikan yang berasal dari mahasiswa. Untuk syarat ketiga, UNY berupaya meningkatkan pemasukan/penerimaan dari semua aset yang berpotensi mendatangkan *income generating*. Aset-aset tersebut dapat berada di tingkat universitas, fakultas, maupun unit-unit lainnya. Selanjutnya, pendapatan UNY dari pengelolaan aset dikoordinasikan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU).

Sejalan dengan upaya BPPU mengawasi dan mengelola aset, manajemen UNY (Rektor dan pejabat terkait keuangan) menyiapkan pengelolaan keuangan yang lebih modern. Persiapan UNY menuju PTN-BH diawali dengan modernisasi pengelolaan keuangan. Modernisasi pengelolaan keuangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Pencapaian ini ditandai dengan UNY telah melaksanakan semua tahapan modernisasi pengelolaan keuangan BLU yaitu: 1). BLU UNY telah mempunyai Web Site yang representatif dan up to date 2). BLU UNY telah mempunyai layanan terdigitalisasi 3). Keuangan UNY telah terhubung dengan perbankan 4). Penggunaan BIOS 5). tersedia Webservice untuk tranfer data dari BLU ke kementerian keuangan dan 6). Implementasi OA dalam layanan persuratan. Pencapaian modernisasi keuangan ini memberi dampak pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Indikator meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan berdasarkan penelusuran dokumentasi laporan kinerja UNY dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini: Indikator 1: Opini Laporan Keuangan oleh Akuntan Independen Indikator kinerja opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 3 (tiga) laporan, yaitu: (1) laporan auditor independen atas laporan keuangan BLU UNY, (2) laporan auditor independen atas kinerja BLU UNY, dan (3) laporan auditor independen atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan BLU UNY. Penilaian laporan keuangan oleh kantor akuntan publik telah berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian indikator kinerja Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik pada tahun 2019 telah mencapai target yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama dengan capaian tahun sebelumnya yang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau realisasi fisiknya sebesar 100%. Selain dapat mempertahankan Status WTP pada tahun 2018, realisasi capaian opini WTP juga telah memenuhi capaian dari Renstra UNY 2015-2019. Adapun penyelesaian tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK sebesar 82%, dan terealisasi 82,97%. Dengan demikian persentase ketercapaiannya sebesar 101,18%.

Indikator 2: Persentase PNBPN BLU dalam membiayai Biaya Operasional Pendapatan BLU UNY 2019 yang berasal dari PNBPN BLU ditargetkan sebesar 50% dari biaya operasional UNY, terealisasi sebesar 69,39%, dengan tingkat capaian sebesar 138,78%. Jumlah penerimaan riil PNBPN 2019 sebesar Rp334.758.518.743,00.

Indikator 3: Jumlah Nominal Realisasi PNBPN BLU Pada tahun 2019 pendapatan PNBPN BLU UNY sebesar Rp334.758.518.743,00 tercapai 142,45% dari target sebesar Rp235.000.000.000,00. Penerimaan PNBPN tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, dan telah melewati target Renstra UNY sebesar Rp190.000.000.000,00. Penerimaan berasal dari penerimaan Pendidikan, dan Non Pendidikan.

Indikator 4: Jumlah Pendapatan dari Income Generating Activity Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan Aset ditargetkan sebesar Rp16.000.000.000,00 tercapai sebesar Rp21.336.271.109,00 dengan tingkat capaian sebesar 133,35%. Penerimaan dari pengelolaan aset yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU) terdiri dari aset-aset yang berada di tingkat universitas, Fakultas, maupun unit-unit lainnya. Penerimaan ini lebih besar dari realisasi tahun 2018, dan sudah mencapai target Renstra UNY sebesar Rp13.000.000.000,00.



Indikator 5: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU. Modernisasi pengelolaan keuangan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian ini ditandai dengan UNY telah melaksanakan semua tahapan modernisasi pengelolaan keuangan BLU yaitu: (1) BLU UNY telah mempunyai website yang representatif dan up to date; (2) BLU UNY telah mempunyai layanan terdigitalisasi; (3) Keuangan UNY telah terhubung dengan perbankan; (4) Penggunaan BIOS; (5) tersedia webservice untuk transfer data dari BLU ke kementerian keuangan; (6) Implementasi OA dalam layanan persuratan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BPPU, pengelolaan aset UNY belum terdokumentasi dengan rapi. Proses identifikasi aset UNY yang dapat mendatangkan potensi *income generating* baru mulai dirapikan pada tahun 2021 hingga sekarang belum selesai. Adapun penyusunan tarif untuk pemanfaatan aset baru mulai dilaksanakan pada paruh semester kedua tahun 2022. BPPU bersama dengan manajemen UNY juga telah memulai sosialisasi kepada seluruh civitas akademika, masyarakat di dalam kampus, dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang terjadi. Masalah tersebut misalnya privatisasi aset atau naiknya biaya kuliah. Upaya persiapan kedua adalah perubahan tata kelola ini mencakup perubahan struktur organisasi. Perubahan status UNY BLU menjadi UNY PTN-BU tentunya membawa dampak perubahan tata kelola. Perubahan tata kelola ini harus mendapat payung hukum dari pemerintah pusat. Setelah payung hukum ada, maka pelaksanaan UNY PTN-BH diatur oleh Peraturan Rektor.

Salah satu perubahan tata kelola yang diatur adalah menetapkan majelis wali amanat (MWA). MWA berperan sebagai institusi tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan dan arah perguruan tinggi. MWA selanjutnya melaporkan perkembangan institusi perguruan tingginya kepada pembina yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sampai saat ini perubahan tata kelola belum terlaksana. Perangkat sudah disiapkan, tetapi belum disahkan karena menunggu legalitas payung hukum dari pemerintah pusat. Sejalan dengan proses menunggu perangkat hukum disahkan oleh Presiden, manajemen mulai menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola PTN-BH melalui workshop dan pelatihan persiapan menuju PTN BH.

Ketiga, segera melakukan inventarisasi untuk transfer aset. Proses transfer aset ini akan berjalan lancar ketika proses identifikasi aset UNY telah selesai. Pengelolaan administrasi yang baik dan optimalisasi aset akan menentukan kualitas perguruan tinggi. Selanjutnya, UNY PTN-BH akan mendapatkan anggaran dari APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Kesiapan Pengelolaan Aset UNY dari Sudut Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY*

Kesiapan pengelolaan aset UNY dari sudut pandang SPI UNY menunjukkan bahawa tahap sosialisasi telah berhasil dilaksanakan. Terkait dengan perubahan tata kelola, informan SPI menyatakan “UNY masih menunggu payung hukum disahkan oleh Presiden RI. Setelah payung hukum disahkan maka UNY dapat bergerak menyusun perangkat peraturan sebagai pedoman pelaksanaan UNY PTN-BH”. Lebih lanjut, SPI memberikan informasi tambahan, sejalan menunggu keputusan tandatangan Presiden, SPI berupaya mendorong manajemen UNY untuk menurunkan hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK).

SPI menjelaskan pada tahap terakhir, transfer aset, belum dilaksanakan. Identifikasi aset UNY dinilai SPI belum terlaksana secara optimal. Masih ada beberapa status aset UNY yang belum jelas kepemilikannya, misalnya tanah. Selain itu, aset yang ada di bawah pengelolaan dan pengawasan BPPU dinilai kurang layak, sementara aset yang di bawah pengelolaan Inkubator Bisnis tidak masuk dalam pengelolaan dan pengawasan BPPU. Perlu koordinasi antara BPPU dan Inkubator Bisnis dalam mengelola dan mengoptimalkan aset UNY. Identifikasi aset yang telah berjalan di UNY hingga kini sebatas identifikasi internal, mengenal potensi aset mana yang dapat menjadi *income generating*.



Identifikasi aset antara UNY dengan KPKPN belum dapat dilakukan. Hal ini juga menyebabkan transfer aset belum dilaksanakan oleh UNY ke Pemerintah Pusat.

## Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang sama dengan penelitian (Naibaho, 2019). Terkait dengan kesiapan pengelolaan aset UNY dari sudut pandang pengelola, dalam hal ini rektor dan pejabat terkait serta BPPU, tiga tahapan persiapan UNY menuju PTN-BH telah sampai pada tiga tahap, yaitu sosialisasi, perubahan tatakelola struktur organisasi, dan transfer aset. Tahap sosialisasi tidak ada kendala berarti, semua civitas akademika telah memahami kebutuhan perubahan UNY dari PYN BLU menjadi PTN-BH. Namun demikian, sosialisasi harus selalu dilaksanakan untuk menghindari gejala masalah terutama isu terkait privatisasi aset dan kenaikan uang kuliah. Selama ini UNY dikenal dengan kampus yang “berbiaya murah”. Citra kampus murah ini tentu akan terhapus dengan perubahan status UNY PT BH.

Perubahan tata kelola UNY menuju PTN BH terlaksana ketika draft PP PTN BH telah ditandatangani oleh Presiden. Sampai kini draft tersebut belum ditandatangani karena terdapat kriteria belum terpenuhi oleh UNY. Kriteria tersebut terkait dengan jumlah temuan BPK. Pada tahun 2020-2021 jumlah persentasi temuan BPK yang ditindaklanjuti mencapai di atas 75%, namun dengan adanya program percepatan UNY menuju PTN BH, jumlah temuan menjaid lebih banyak tetapi tidak lanjutnya belum optimal. Temuan BPK yangd itindak lanjuti turun menjadi 51% pada awal tahun 2022 dan pada paruh semester kedua baru mencapai 59%. Hal ini yang menjadi penyebab Presiden belum menandatangani draft PP PTN BLU UNY.

Transfer aset UNY ke Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan. UNY masih memiliki beberapa tugas mengklarifikasi status kepemilikan tanah. Beberapa tanah memiliki status dobel pemilik, misal satu tanah dobel kepemilikan antara UNY dengan UGM, UNY dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu diperjelas statusnya, setelah status jelas, maka proses transfer semua tanah yang selama ini “dimiliki” UNY dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan selanjutnya UNY akan mendapat surat keterangan hak guna. Aset yang dapat dikelola penuh oleh UNY setelah menjadi PTN BH adalah Bangunan dan Gedung.

SPI menyoroti beberapa aset yang potensial mendatangkan *income generating* belum optimal dikelola. Unit kerja yang memiliki aset belum memiliki rencana pemasaran pemanfaatan aset, hal ini menyebabkan penerimaan aset belum optimal. SPI juga menemukan Inkubator Bisnis kurang koordinasi dengan BPPU. Banyak aset dan unit bisnis yang berkembang di Inkubator Bisnis namun belum masuk dalam pengelolaan dan pengawasan BPPU. Sementara di lain sisi, beberapa aset dan unit bisnis yang ada di bawah pengelolaan dan pengawasan BPPU masih pada level pertumbuhan awal yang seharusnya lebih tepat di bawah Inkubasi Bisnis.

## KESIMPULAN

Perubahan untuk menjadi PTN-BH diharapkan dapat mendorong PTN mengoptimalkan potensi yang dimiliki termasuk aset agar menjadi institusi yang mandiri, produktif, dan mampu melakukan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Kesiapan pengelolaan atas aset UNY dalam rangka optimalisasi *income generating* diperlukan untuk mendukung UNY menjadi PTN BH. Semakin baik kesiapan pengelolaan atas aset diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi perolehan *income generating* saat UNY menjadi PTN BH. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, tiga tahapan kesiapan menuju PTN BH hanya tahap sosialisasi yang telah terlaksana, tahap kedua, tatakelola masih menunggu Presiden mensahkan draft PP PTN BH



UNY. Draft tersebut akan ditandatangani jika tindak lanjut temuan BPK di atas 75% (posisi sekarang masih 59%). Adapun tahap terakhir, transfer aset sama sekali belum terlaksana. Masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan UNY sebelum transfer aset, yaitu kejelasan status tanah yang dobel serta kejelasan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara Inkubator Bisnis UNY dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset. Berdasarkan hasil temuan penelitian maka saran untuk UNY antara lain: meningkatkan jumlah tindak lanjut temuan BPK, segera menyelesaikan status kepemilikan tanah yang dobel, dan rekonsiliasi peran, fungsi, dan tanggungjawab antara Inkubator Bisnis UNY dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. W. (2009). *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication Inc. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Dua). Salemba Empat.
- Iskak, J. F., Megawati, L. R., & Fadillah, A. (2020). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovasi (SENTRINOV) VI*, 1–8.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Participatory Development. Serial Otonomi Daerah*. . Penerbit Andi.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Daerah. *Wedana, Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Roswaty. (2017). Analisis Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 21–27.
- Setiadi. (2020). Audit Pengelolaan Aset (BMN) [ada BKKBN RI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 5(1), 23–32.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.